

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018-2022

A'ang Adi Putra¹, Muhammad Riza Hafizi², Karina Awalia Zahra³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Palangka Raya

aangadi2001@gmail.com¹, riza.hafizi@uin-palngkaraya.ac.id²,
karina.awalia.zahra@uin-palangkaraya.ac.id³

Abstrak

Pemerintah daerah berperan aktif dalam mengelola kekayaan daerah dan menggunakan belanja daerahnya masing-masing yang diatur dengan kebijakan yang bernama otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengan Tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 5 kabupaten dan 1 kota selama 5 tahun, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur. Data diolah dengan bantuan aplikasi *Statistical Package For Social Science* (SPSS). Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi 0,002 lebih kecil dari 0,05, Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah

Abstract

Regional governments play an active role in managing regional wealth and use their respective regional expenditures which are regulated by a policy called regional autonomy. Regional autonomy is the authority of an autonomous region to regulate and manage the interests of the local community according to its initiative based on community aspirations, by statutory regulations. This research aims to determine the influence of local original income, general allocation funds, and profit-sharing funds on regional expenditure in Central Kalimantan Province in 2018-2022. This research is quantitative research carried out in Central Kalimantan Province. The population that will be used in this research is 5 districts and 1 city for 5 years, data collection techniques using documentation techniques. The data collection method uses the library research method. The technique used to test the hypothesis is path analysis. The data was processed with the help of the Statistical Package For Social Science (SPSS) application. Based on hypothesis testing carried out, Regional Original Income has a Positive and Significant Influence on Regional Expenditures with a significance value of 0.002 which is smaller than 0.05, General Allocation Funds have a Positive and Significant Influence on Regional Expenditures with a significance value of 0.000 which is smaller than 0.05, and Shared Funds The results have a positive and significant effect on Regional Expenditures with a significance value of 0.000 which is smaller than 0.05.

Keywords: *Regional Autonomy, Regional Original Income, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Regional Expenditures*

1. Pendahuluan

Implementasi otonomi daerah di Indonesia, yang dimulai secara signifikan pada tahun 2001, bertujuan menciptakan kemandirian daerah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunannya. Esensi otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Dalam konteks ini, belanja daerah menjadi indikator kunci kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, dituntut untuk dapat mengoptimalkan pendapatannya guna membiayai belanja daerah. Sumber pendapatan utama daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (UU No. 33 Tahun 2004). Namun, fenomena yang terjadi di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya

kesenjangan antara target dan realisasi belanja daerah secara konsisten selama periode 2018-2022. Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat realisasi belanja selalu di bawah target, dengan realisasi 2022 hanya mencapai Rp 3.928,54 Miliar dari target Rp 5.191,68 Miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mengkonversi potensi pendapatan daerah menjadi belanja yang efektif untuk pembangunan.

Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Iqbal (2020) di Provinsi Aceh, telah membuktikan bahwa PAD, DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun, terdapat beberapa gap yang menjadi dasar novelty penelitian ini, diantaranya temuan di satu daerah tidak serta merta berlaku sama di daerah lain karena karakteristik fiskal dan potensi daerah yang berbeda. Penelitian ini menguji model serupa dalam konteks Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki struktur ekonomi berbasis sumber daya alam yang kuat. Penelitian ini memfokuskan pada variabel DBH sebagai pengganti DAK. Hal ini sangat relevan mengingat Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan kontribusi sektor kehutanan dan pertambangan yang besar, sehingga DBH dihipotesiskan memainkan peran yang lebih krusial dalam mempengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan DAK. Berbeda dengan penelitian Iqbal (2020) yang mencakup seluruh kabupaten/kota, penelitian ini membatasi pada 6 kabupaten/kota dari 14 yang ada di Kalimantan Tengah, memungkinkan analisis yang lebih mendalam pada unit pemerintahan terpilih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2018-2022.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan adalah data panel sekunder yang bersumber dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 6 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2018-2022. Keenam kabupaten/kota tersebut adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Katingan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria utama ketersediaan laporan APBD yang dipublikasikan secara lengkap untuk periode penelitian.

Terdapat satu variabel dependen dan tiga variabel independen dalam penelitian

ini. Variabel Dependen (Y) yaitu Belanja Daerah, sedangkan Variabel Independen (X) yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH). Data dianalisis menggunakan software SPSS versi 26 dengan tahapan Statistik Deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai data penelitian, termasuk nilai mean, standar deviasi, minimum, dan maksimum, Uji Asumsi Klasik untuk memastikan model regresi memenuhi syarat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE), yang meliputi Uji Normalitas yang diuji dengan Kolmogorov-Smirnov untuk memastikan residual berdistribusi normal (signifikansi $> 0,05$), Uji Multikolinearitas yang diukur dengan nilai Tolerance ($> 0,10$) dan Variance Inflation Factor ($VIF < 10$) untuk memastikan tidak ada korelasi tinggi antar variabel independen, Uji Heteroskedastisitas yang diuji dengan Korelasi Spearman's Rho untuk memastikan variance residual tetap (signifikansi $> 0,05$), Uji Autokorelasi yang diuji dengan Durbin-Watson untuk data time-series, dengan nilai statistik mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, Analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan terakhir Uji Hipotesis terdiri dari Uji Statistik t untuk menguji signifikansi pengaruh parsial masing-masing variabel independen secara individual (tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau $0,05$), Uji Statistik f untuk menguji signifikansi pengaruh parsial masing-masing variabel independen secara bersamaan (tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ atau $0,05$), koefisien Determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi semua variabel independen secara bersama-sama.

3. Hasil

3.1 Deskripsi Unit Analisis Observasi

Objek penelitian ini adalah kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2018-2022. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang di peroleh langsung dari objek penelitian yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) tahun 2018-2022. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dimana sampel yang di pilih yaitu sebanyak 5 kabupaten dan 1 kota di provinsi Kalimantan tengah maka di peroleh sampel sebanyak 6 dengan kurun waktu 5 tahun yakni 2018-2022.

Tabel 1
Objek Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	Kabupaten Kotawaringin Barat
3.	Kabupaten Kapuas
4.	Kabupaten Seruyan
5.	Kabupaten Katingan
6.	Kota Palangka Raya

Sumber : Dibuat oleh peneliti 2023

3.2 Hasil Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	30	53029000000	392016000000	157440333333.3333	86979407274.06186
Dana Alokasi Umum	30	559065000000	898004000000	685110700000.	100698148567.76591
Dana Bagi Hasil	30	44069000000.	624069000000	156381200000.00003	112173904379.23946
Belanja Daerah	30	1039045000000	1985011000000	1406888266666.6667	318399360196.9977
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Tabel 2 menjelaskan analisis statistik deskriptif yang menunjukkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 yang dapat dilihat dari N. serta nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standard deviasi sebagai berikut.

1. Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 53.029.000.000 dan nilai maksimum sebesar 392.016.000.000, nilai mean sebesar 157.440.333.333,3333 dan standar deviasi sebesar 86.979.407.274,06186.
2. Variabel DAU memiliki nilai minimum sebesar 559.065.000.000 dan nilai maksimum sebesar 898.004.000.000, nilai mean sebesar 685.110.700.000 dan standar deviasi sebesar 100.698.148.567,76591

3. Variabel DBH memiliki nilai minimum sebesar 440.69.000.000 dan nilai maksimum sebesar 624.069.000.000, nilai mean sebesar 156.381.200.000 dan nilai standar deviasi sebesar 112.173.904.379,23946.
4. Variabel BD memiliki nilai minimum sebesar 1.039.045.000.000 dan nilai maksimum sebesar 1.985.011.000.000, nilai mean sebesar 1.406.888.266.666,6667 dan nilai standar deviasi 318.399.360.196,99770.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test

Nilai Signifikasi	Taraf sig. Uji One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test	Keterangan
0.200	0,05	Berdistribusi Normal

Sumber :Diolah peneliti, SPSS 26

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel diatas menunjukkan nilai signifikansi (*asympt.sig*) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dengan kata lain model regresi yang digunakan memenuhi asumsi Normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4
Collinearity Statistics Tolerance & VIF

Collinearity Statistics			
Model	Tolerance	VIF (<i>Variance Influence Factor</i>)	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	.968	1.033	Tidak terjadi Multikolonieritas
Dana Alokasi Umum	.833	1.200	
Dana Bagi Hasil	.857	1.167	

Sumber :Diolah peneliti, SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perhitungan menunjukan nilai tolerance 0,968 (PAD), 0,833 (DAU), 0,857 (DBH), dan hasil pehitungan nilai VIF juga menunjukan variabel independen memiliki nilai VIF <10 1,457 (PAD), VIF <10 1,200 (DAU), dan VIF <10 1,167 (DBH), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 5.
Durbin-Watson

Durbin-Watson	Keterangan
1.488	Terbebas dari Autokorelasi

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Berdasarkan pengujian autokorelasi pada tabel 4.5 dapat dilihat nilai DW sebesar 1,488. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel Durbin Watson . dari tabel statistik d didapat nilai dL sebesar 1,2138 dan dU sebesar 1,6498 dengan jumlah variabel independen (K=3) dan jumlah sampel (N=30).

Oleh karena itu nilai dU lebih besar dari nilai d dan lebih kecil dari 4-dU atau $dU > d < 4-dU$ ($1,488 > 1,6498 < 2,3502$). Dikarenakan d terletak diantara du dan (4-dU) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, positif atau negatif, sehingga data terbebas dari autokorelasi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat *Speaman's rho*, jika tingkat signifikan berada diatas 5% (0,05) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas, tetapi jika berada dibawah 5% (0,05) terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6
Spearman's rho

		Unstandardized Residual	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	Sig. (2-tailed)	.897	Terbebas dari heteroskedastisitas
	N	30	
Dana Alokasi Umum	Sig. (2-tailed)	.980	Terbebas dari heteroskedastisitas
	N	30	
Dana Bagi Hasil	Sig. (2-tailed)	.358	Terbebas dari heteroskedastisitas
	N	30	
Pertumbuhann Ekonomi	Sig. (2-tailed)	.804	Terbebas dari heteroskedastisitas
	N	30	

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikan PAD sebesar 0,897, DAU sebesar 0,980, DBH sebesar 0,358, dan PE sebesar 0,804. Karena nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil Uji koefisien Determinansi R²

Tabel 7
Adjusted R²

Model	Adjusted R Square	Keterangan
1	.902	Terdapat pengaruh

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas didapatkan nilai pada Adjusted R Square sebesar 0,902 yang artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Bagi Hasil (X3) terhadap Belanja Daerah (Y) sebesar 90,2% dan berada pada kategori kuat karena lebih dari 0,67 menurut (chin 1998).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Tabel 8
Parameter Uji Statistik t Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Model	t	Sig.	Keterangan
1 Pendapatan Asli Daerah	3.404	.002	H1 Diterima

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Diketahui nilai sign 0,002 < 0,05 dan nilai t hitung 3,404 dan nilai t tabel 2,052 dalam artian 3,404 > 2,052 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Tabel 9
Parameter Uji Statistik t Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Model	T	Sig.	Keterangan
1 Dana Alokasi Umum	8.441	.000	H2 Diterima

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Diketahui nilai sign 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 8,441 dan nilai t tabel 2,052 dalam artian 8,441 > 2,052 sehingga dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah.

Daerah.

Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Tabel 10

Parameter Uji Statistik t Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Model		t	Sig.	Keterangan
1	Dana Bagi Hasil	4.158	.000	H3 Diterima

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Diketahui nilai sign $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung 4,158 dan nilai t tabel 2,052 dalam artian $4,158 > 2,052$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 11

Uji Regresi Linear Berganda

Model			Sig.	Keterangan
1	(Constant)	-355921669442.459		
	Pendapatan Asli Daerah	1,122	.000	Berpengaruh Positif
	Dana Alokasi Umum	2,091	.000	Berpengaruh Positif
	Dana Bagi Hasil	0,982	.000	Berpengaruh Positif

Sumber : Diolah peneliti, SPSS 26

Diketahui bahwa rumus linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + b_3.x_3 + e$$

$$= -3,5592166944 + 1,122 + 2,091 + 0,982$$

Nilai a sebesar -3,5592166944 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel belanja daerah belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel PAD (X1) DAU (X2) dan DBH (X3). Jika variabel independen tidak ada maka variabel belanja daerah tidak mengalami perubahan.

1. b_1 (nilai koefisien regresi x_1) sebesar 1,122, menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel PAD maka akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 1,122, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. b_2 (nilai koefisien regresi x_2) sebesar 2,091, menunjukkan bahwa variabel DAU mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel DAU maka akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 2,091, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

3. b_3 (nilai koefisien regresi x_3) sebesar 0,982, menunjukkan bahwa variabel DBH mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel DBH maka akan mempengaruhi belanja daerah sebesar 0,982, dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

3.3 Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 3,404 dengan nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan hipotesis pertama H_1 yang menyatakan penelitian ini H_a diterima dan H_o ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah bergantung kepada Pendapatan Asli Daerah untuk pembelanjaan daerah yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dengan tujuan menunjang sarana dan prasarana publik yang baik serta infrastruktur yang meningkatkan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan potensi yang dimiliki masing masing daerah, dalam meningkatkan dana yang diperoleh untuk menjadi sumber pembelanjaan daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan potensi daerah yang dimiliki.

Jika pembangunan berbagai sarana dan prasarana publik dapat ditingkatkan maka Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh juga semakin meningkat. Karena peningkatan sarana dan prasarana dibelanjakan melalui belanja daerah. Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah semakin tinggi juga alokasi belanja daerah yang diperoleh.

Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah maka daerah tersebut akan mandiri dengan pendapatan daerahnya dan tidak akan tergantung pada pemerintahan pusat hal tersebut bias disebut Otonomi Daerah yang mengelola daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah mencatat laporan keuangan daerah dan mempublikasikan kepada masyarakat melalui website pemerintahan. Dalam Islam mencatat laporan keuangan adalah sebuah keutamaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang (bertransaksi) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (mencatat dan membukukannya).

Dalam Ayat tersebut membahas keutamaan untuk melakukan sifat *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan prinsip utama yang harus dipegang oleh umat Islam. Prinsip ini menekankan pada perintah untuk menyerukan atau mengabarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Sama Hal nya dengan pencatatan laporan keuangan hendaknya kita mencatat atau menuliskannya dengan benar agar tidak terjadi perselisihan sehingga dapat mencegah hal buruk baik di dunia maupun di akhirat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Bela Sania Twinki, Muhammad Iqbal, dan Ariska Miranda yang dimana pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal berpengaruh positif signifikan. Dengan pemahaman apabila belanja modal menurun maka belanja daerah juga menurun dikarenakan belanja modal termasuk kedalam belanja daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh dengan positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Hasil analisis Uji t menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t hitung sebesar 8,441 dengan nilai signifikan 0,000 ($<0,05$) yang artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah sehingga diperoleh kesimpulan hipotesis kedua H2 yang menyatakan penelitian ini Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum sangatlah penting bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang di mana untuk menunjang keberlangsungan pembangunan yang berada di setiap kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang di alokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten), di indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pmda di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan besar kepada masyarakat dan meruapakan suatu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Kondisi ini dapat memperlihatkan apabila Dana Alokasi Umum semakin besar

atau mengalami peningkatan akan mempengaruhi peningkatan dan pengaruh yang besar belanja daerah. Hal ini berkaitan dengan UU No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah cukup signifikan sehingga dapat meningkatkan dan memberi pelayanan publik atau pelayanan lainnya yang cukup baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ariska Miranda, Muhammad Iqbal yang dimana Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dengan pemahaman bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Hal ini dapat diketahui dari uji t sebesar 4.158 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga diperoleh kesimpulan hipotesis ketiga H3 yang menyatakan penelitian ini H_a diterima dan H_o ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwasannya Dana Bagi Hasil sangatlah penting dan harus di bagi secara merata ke setiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah agar pembangunan bisa merata. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana bagi hasil yang berasal dari pajak antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Penatausahaan dan Penggunaan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Pencairan Dana Bagi Hasil harus diselenggarakan secara taat hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel, dengan menjunjung tinggi keadilan dan kepatutan, untuk mencapai tujuan penyaluran Dana Bagi Hasil dapat dicapai, yaitu mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, mengatasi ketimpangan pembangunan infrastruktur, mengurangi, mengatasi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah, dan membantu pemerintah daerah dalam pembiayaan kewenangannya.

Dana Bagi Hasil yang bukan bersumber dari pendapatan asli daerah dan merupakan bagian dari dana transfer pusat, selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, apabila semakin besar alokasinya, maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan alokasi belanja daerah yang semakin besar pula, demikian juga sebaliknya semakin kecil belanja daerah yang akan ditetapkan jika alokasi anggaran dana perimbangan semakin kecil. Hal ini didukung oleh penelitian Paulus Yudi Hermawan dkk, adanya pengaruh positif signifikan antara Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang dimana belanja modal termasuk kedalam belanja daerah, jadi semakin tinggi dana yang diberikan pemerintah pusat maka akan semakin tinggi pula belanja daerah.

4. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian peneliti yakni: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan meningkat Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka akan semakin meningkat Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah pada 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2022. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka akan semakin meningkat Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Daftar Pustaka

- Adyatma, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, 4, No. 2, 194-195.
- Agustina, I. (2022, Juni). Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. *Ekonomi dan Keuangan*, 9, No. 1, 51-60.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBMSPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermawan, P. Y. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Ekonomi dan Manajemen*, 245-247.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

- Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia*, 5 No. 2, 2.
- Jensen. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. *Financial Economic*, 3, No. 4, 305-360.
- Kemenkeu, D. (2015). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemenkeu.
- Machmud, A. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahfud. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Sulawesi: Pusaka Almaila.
- Miranda, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. *Ekonomi Akuntansi*, 6, 123.
- Pationom. (1991). *Sejarah Sosial Palangka Raya*. Jakarta: Depdikbud.
- Riduwan. (2014). *Pengantar Statistik*. Bandung: Alfabeta.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sinaga, J. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungan. *Ekonomi Pembangunan*, 47.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundarwadi, H. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014). *Universitas Negeri Padang*, 446.
- Twinki, B. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Development Economic and Social Studies*, 2, No. 3, 495-500.
- Wulandari, Y. (2014). Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Artikel*, 4.
- Zelmiyanti. (2016). Pendekatan Tori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). *Akuntansi dan Keuangan*, 7, No. 1, 11-21.